

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprillia, dkk. (2019). *Risalah Hukum*. Vol. 15 Nomor 1, 11-31
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. 2019. *Buku Kompilasi Data Statistik Sektoral*. Hal. 107-113.
- Fuad, Anis dan Nugroho Kandung. (2012). *Panduan Praktis Peneliti Kualitatif*. Serang: FISIP Untirta Press.
- Hanifurrahman, D, Fatimah, E, Sugihartoyo. (2019). *Kajian Pembangunan wilayah Kabupaten Bengkalis berbasis Sektor Migas*. Universitas Trisakti . Jakarta Barat. 90-91
- Janice, Astrella. (2015). *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa*
- Moekijat, (1998). *Analisis Jabatan*. Bandung : Mandar Maju
- Mahdi, Kabul Ali. (2003). *Pengembangan Wilayah. Teori & Aplikasi*. Kencana: Jakarta
- Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.*
journal.ip.fisip. Vol. 3 Nomor 3, 1460-1471.
- Yasin, A dan Z, Fachri. (2010). *Pemberdayaan Dan Penguatan Kelembagaan Petani Di Lokasi Operasi Pangan Riau Makmur, Makalah pada Pertemuan Apresiasi Operasi Pangan Riau Makmur Bagi Camat dan Lurah se- Provinsi Riau, Pekanbaru*. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Jurnal

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Practice, Journal of public Administration Research and Theory*. 543-571
- Chris Ansel , Alison Gasho. (2008). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktik. jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik , 18, Edisi 4, 543-571*

- Primadita, Rahayu.E. (2021). Evaluasi Dampak Program Pelatihan Desain Grafis BLK Komunitas As Syifa Syeck Yusuf Di Kota Depok Terhadap Alumni Peserta 2019-2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*. 16(2), 1-10
- Soleh, Ahmad. (2017). Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. Bandung : Universitas Padjajaran. *Jurnal Ilmiah cano ekonomos*. 6(2).
- Tilano, F. A, & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Diponegoro.
- Kurniasih, D., dkk. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1 – 7

a. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18. (2017) pasal 4. *Kewajiban Pelaporan Perusahaan*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11. (2011). *Indikator Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4. (2004). *Pembagian Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Non Lokal*.
- Keputusan Presiden Nomor 4. (1980). *Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13. (2003). *Ketenagakerjaan*.

b. Website

- Tugas Pokok Dan Fungsi <https://bengkaliskab.go.id/view/opd/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi> (diakses pada 14 juni 2021)
- Ketenagakerjaan, Pengertian Kelompok Klasifikasi Tenaga Kerja <https://www.kompas.com> (diakses pada 6 Juni 2021) Perda Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. Peraturan.BPK.go.id (diakses pada 6 Juni 2021)
- PerMenaKer.No.39 Tahun 2016. Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. <http://jdlh.kemnaker.go.id> (diakses pada 6 Juni 2021)

Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Diponegoro 2017 (diakses pada 23 Februari 2022)

Apa-itu-*collaborative-governance*. <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-76-apa-itu-collaborative-governance-.html>. (diakses pada 25 Februari 2022).

Kewajiban untuk melapor dari perusahaan.

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ini-3-alasan-mengapa-setiap-perusahaan-harus-lakukan-wajib-lapor-ketenagakerjaan>. (diakses pada 5 Juni 2022)